

KESENJANGAN PENDIDIKAN ANTARA WILAYAH PEDESAAN DAN PERKOTAAN: ANALISIS KEBIJAKAN DAN PRAKTIK DI INDONESIA

**Cita Putri Calista, Firzan Achriansyah Izazi Putra, Felliza Maulita, Mahirah Zahra,
Nasywa Aurellia Syakirah**

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak: Pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan merupakan komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Namun, kesenjangan minat pendidikan antara kota dan pedesaan masih menjadi masalah besar di Indonesia. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ekonomi, akses ke fasilitas pendidikan, dan harapan sosial. Sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pengajar berkualitas tinggi, dan dukungan teknologi yang memadai seringkali menjadi masalah di daerah pedesaan. Untuk mengatasi perbedaan ini, berbagai kebijakan telah dibuat, seperti program bantuan pendidikan, pembagian tenaga pengajar, dan digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan akses ke daerah terpencil. Namun, untuk memastikan pendidikan yang merata, kebijakan tersebut harus dievaluasi lebih lanjut. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, pendekatan yang berbasis teknologi adaptif juga dapat menjadi pendekatan yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa variabel yang mempengaruhi disparitas pendidikan dan meninjau kebijakan yang telah diterapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis konkret tentang cara meningkatkan inklusi dan keberlanjutan pendidikan di Indonesia dengan menggunakan metode analisis kebijakan dan data empiris.

Kata kunci: Pendidikan, *Sustainable Development Goals*, SDGs, kesenjangan pendidikan, kebijakan pendidikan, wilayah perkotaan dan pedesaan, Indonesia

Abstract: Education is one of the key components in achieving sustainable development goals (SDGs) and is an important component of sustainable development. However, the gap in educational interest between urban and rural areas remains a major problem in Indonesia. The level of community participation in formal education is influenced by several factors, including economics, access to educational facilities, and social expectations. Educational facilities and infrastructure, high-quality teaching staff, and adequate technological support are often problematic in rural areas. To address these disparities, various policies have been implemented, such as educational assistance programs, teacher redistribution, and the digitization of learning to improve access to remote areas. However, to ensure equitable education, these policies must be further evaluated. To improve the quality of education in disadvantaged areas, an adaptive technology-based approach can also be an effective approach. The purpose of this study is to examine the variables that influence educational disparities and review the policies that have been implemented. This study is expected to provide a concrete analysis of how to improve the inclusion and sustainability of education in Indonesia using policy analysis and empirical data.

Keywords: Education, *Sustainable Development Goals*, SDGs, educational disparities, education policies, urban and rural areas, Indonesia

PENDAHULUAN

Pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menghasilkan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil adalah komponen penting dalam pembangunan suatu negara. Salah satu pilar utama dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pendidikan, khususnya tujuan keempat, yang berfokus pada pendidikan berkualitas, inklusif, dan merata di seluruh dunia.

Pemerataan pendidikan masih merupakan masalah yang nyata di Indonesia, terutama dalam hal perbedaan minat belajar antara masyarakat di perkotaan dan pedesaan. Anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan biasanya memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, tenaga pengajar yang lebih baik, dan peluang akademik yang lebih baik. Sebaliknya, anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan seringkali menghadapi banyak tantangan, termasuk infrastruktur sekolah yang terbatas, akses teknologi yang terbatas, dan kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Faktor sosial dan budaya juga berpengaruh, seperti fakta bahwa sebagian masyarakat di daerah pedesaan terkadang tidak memprioritaskan pendidikan formal.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan, seperti program bantuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran, yang diharapkan dapat memperluas akses bagi orang-orang yang tinggal di daerah terpencil. Namun, masih perlu ditinjau lebih lanjut untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar meningkatkan minat dan partisipasi dalam pendidikan.

Analisis ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan, serta meninjau strategi yang telah diambil untuk mengatasi perbedaan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan saran yang dapat membantu mencapai sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan menggunakan pendekatan berbasis kajian kebijakan dan data empiris. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat bekerja sama untuk membuat ekosistem pendidikan yang inklusif di seluruh Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) dibuat karena orang di seluruh dunia menyadari betapa pentingnya pembangunan yang melibatkan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. Dimulai pada Konferensi Stockholm tahun 1972, konsep pembangunan berkelanjutan telah berkembang melalui berbagai konferensi internasional, seperti Rio 1992 dan Johannesburg 2002. *Sustainable Development Goals* (SDGs) akhirnya ditetapkan sebagai pengganti *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015 oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengalaman di Indonesia dengan pelaksanaan MDGs memberikan pelajaran penting untuk menerapkan SDGs, terutama dalam hal melibatkan semua pihak dalam proses dan memasukkannya ke dalam perencanaan pembangunan nasional.

Sesuai dengan hasil Deklarasi, SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang harus dicapai pada tahun 2030, dengan penekanan pada tiga pilar utama, masing-masing dengan target dan indikator unik untuk mengarahkan pembangunan global menuju kesejahteraan manusia yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip "*No One Left Behind*" adalah dasar program, yang berarti bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus inklusif dan adil untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Tiga pilar membentuk Sustainable Development Goals. Yang pertama adalah Pilar Sosial, yang berfokus pada pembangunan manusia dalam konteks sosial; yang kedua adalah Pilar Ekonomi, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; dan yang terakhir adalah Pilar Lingkungan, yang mencakup keanekaragaman hayati. Selain itu, dasar institusi tata kelola memberikan kekuatan untuk ketiga pilar tersebut.

Program SDGs ini berisi 17 tujuan utama *sustainable development goals*, yaitu (1) Mengatasi dan mengakhiri kemiskinan secara global, (2) Mengurangi kelaparan, memenuhi kebutuhan pangan, dan mengembangkan pertanian berkelanjutan, (3) menjamin kesejahteraan dan kesehatan setiap orang di segala usia, (4) Peluang pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas tinggi untuk sepanjang hayat bagi seluruh usia, (5) Kesetaraan gender, (6) Memastikan bahwa air bersih dan sanitasi tetap tersedia untuk semua, (7) Akses universal ke energi modern, terjangkau, konsisten, dan berkelanjutan, (8) Menyediakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pekerjaan yang produktif dan inklusif, dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan kerja., (9) Inovasi dalam industri dan infrastruktur, (10) Menurunkan ketimpangan domestik dan internasional, (11) Membuat kota dan pemukiman aman dan nyaman, (12) Produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, (13) Mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, (14) Melestarikan perairan terutama laut, (15) Melakukan pemulihan, perlindungan, dan pengelolaan hutan, membalikkan degradasi lahan, dan mencegah kehilangan

beberapa keanekaragaman hayati, (16) Menyediakan akses keadilan untuk setiap orang, (17) Menghidupkan kembali kemitraan global dan memperkuat sarana pelaksanaan (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Target Utama SDGs dalam Fokus Pendidikan

Selama bertahun-tahun, pendidikan telah diakui sebagai dasar kemajuan bangsa. Ini terbukti dalam *sustainable development goals* (SDGs), terutama SDGs 4 yang menargetkan "Pendidikan Berkualitas" dan, menurut jurnal yang ada, fokus utama SDGs untuk pendidikan di Indonesia dapat dirangkum menjadi tiga pilar utama yang saling terkait: penyediaan pendidikan berkualitas untuk semua, penanggulangan kesenjangan pendidikan yang masif, dan penyediaan pendidikan berkualitas untuk semua.

Pertama dan paling penting adalah menyediakan pendidikan berkualitas tinggi untuk semua. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas sekarang lebih dari hanya cita-cita. Sebaliknya, pemerintah melakukan upaya terus menerus untuk memastikan hal ini (Nurfatimah, Hasna, & Rostika, 2022). Tetapi pemerintah bukan satu-satunya yang bertanggung jawab, tetapi juga sektor swasta, lembaga pendidikan, dan setiap anggota masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap pendidikan yang relevan, efisien, dan transformatif.

Namun, kesenjangan pendidikan adalah masalah besar yang dihadapi dalam upaya mewujudkan standar pendidikan universal ini. mengakui perbedaan ini sebagai masalah besar saat ini di Indonesia (Wijayanti, Darmawan, & Marwan, 2024). Kualitas, akses, dan fasilitas pendidikan berbeda antara wilayah, terutama antara perkotaan dan pedesaan. Faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah yang tidak merata, perbedaan tingkat ekonomi, kondisi geografis yang sulit, dan kualitas tenaga pengajar yang berbeda semuanya berkontribusi pada peningkatan disparitas ini. Oleh karena itu, salah satu tujuan penting dari SDGs dalam bidang pendidikan adalah mengatasi ketidaksamaan ini melalui kebijakan yang lebih inklusif, pembagian anggaran yang lebih adil, peningkatan kualitas instruksi guru, dan penggunaan teknologi untuk pendidikan jarak jauh (Wijayanti, Darmawan, & Marwan, 2024).

Pemanfaatan teknologi menjadi strategi penting untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas tinggi karena penanggulangan kesenjangan sangat penting. secara khusus menekankan bagaimana TIK dapat membantu memberikan pendidikan yang baik di daerah terdepan, tertinggal, terpencil, dan perbatasan (DTP) (Siahaan, 2013). Hak atas pendidikan berkualitas harus merata, menjangkau anak-anak dari keluarga kurang beruntung atau yang tinggal di daerah terpencil, menurut pertanyaan retoris dalam jurnal ini, "Pendidikan berkualitas milik siapa?" (Siahaan, 2013). Selain itu, menekankan betapa pentingnya literasi digital. Meskipun fokus utamanya adalah masalah moral dan ketimpangan sosial, dampaknya terhadap akses pendidikan sangatlah besar. Individu yang memiliki literasi digital memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara bijak, yang pada gilirannya memungkinkan lebih banyak akses ke sumber pendidikan dan pengalaman belajar yang lebih baik.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama SDGs dalam hal pendidikan di Indonesia adalah mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi, merata, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini dicapai melalui upaya kolektif untuk mengatasi kesenjangan yang ada, memastikan inklusivitas, dan memanfaatkan sepenuhnya potensi teknologi untuk membangun masa depan pendidikan yang lebih cerah untuk semua orang Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Pendidikan di Indonesia

Pendidikan merupakan pondasi utama bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Melalui pendidikan, individu tidak hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai moral, etika, serta karakter kebangsaan. Sayangnya, di Indonesia, idealisme pendidikan untuk semua belum sepenuhnya terealisasi. Ketimpangan atau kesenjangan pendidikan masih menjadi isu krusial yang menghantui dunia pendidikan nasional hingga hari ini. Kesenjangan pendidikan di Indonesia muncul dalam berbagai bentuk, seperti akses, kualitas, fasilitas, hingga kesempatan. Ketimpangan yang paling mencolok terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di satu sisi, sekolah-sekolah di kota besar memiliki sarana yang modern, akses internet cepat, tenaga pengajar yang berkualitas, dan lingkungan belajar yang kondusif. Di sisi lain, sekolah di pedesaan masih berkutat dengan keterbatasan ruang kelas, minimnya perpustakaan dan laboratorium, serta akses teknologi yang nyaris tidak tersedia.

Sebuah studi etnografi menyebutkan bahwa ketimpangan kualitas pendidikan ini berakar dari persoalan struktural dan kultural yang mengakar dalam masyarakat. Ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat desa yang makin lebar berimplikasi langsung terhadap kualitas pendidikan yang mereka terima (Wahyono, 2012). Faktor lain seperti minimnya tenaga pengajar profesional juga memperparah keadaan. Guru-guru lebih banyak terkonsentrasi di kota karena fasilitas yang mendukung dan kesejahteraan yang lebih terjamin.

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang membandingkan dua sekolah di Kendari dan Bombana, yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam ketersediaan sarana dan prasarana. Sekolah di kota memiliki akses terhadap laboratorium, internet, dan fasilitas olahraga yang baik, sedangkan sekolah di desa masih kekurangan ruang kelas dan perlengkapan dasar untuk belajar (Sudiro et al., 2024). Ketimpangan ini pada akhirnya mempengaruhi kualitas proses belajar-mengajar dan pencapaian siswa. Sementara itu, dari perspektif kebijakan pendidikan, kesenjangan ini menunjukkan lemahnya pemerataan anggaran dan infrastruktur pendidikan. Meskipun berbagai program telah digulirkan pemerintah seperti Program Indonesia Pintar, BOS (Bantuan Operasional Sekolah), hingga SM3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan geografis (Vito et al., 2022).

Menurut Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, kesenjangan pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh perbedaan kondisi geografis dan ekonomi keluarga. Anak-anak dari keluarga miskin di daerah terpencil sering kali tidak memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang layak. Ditambah lagi, biaya-biaya tidak langsung seperti transportasi, seragam, atau buku masih menjadi beban bagi keluarga miskin (Wijayanti et al., 2024).

Kesenjangan ini bukan hanya berdampak pada masa kini, tetapi juga menciptakan ketimpangan kesempatan di masa depan. Anak-anak desa memiliki kemungkinan lebih kecil untuk melanjutkan pendidikan tinggi, masuk ke dunia kerja yang layak, dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka. Di sinilah pendidikan seharusnya berperan sebagai alat mobilitas sosial, namun justru berisiko menjadi instrumen reproduksi ketimpangan sosial. Namun demikian, harapan tetap ada. Salah satu jalan yang mulai dilirik adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui teknologi, pendidikan berkualitas bisa diakses dari mana saja, termasuk dari daerah-daerah terpencil. Sudirman Siahaan (2013) menyebut bahwa TIK sangat potensial untuk memperluas akses pendidikan dan menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu, asalkan guru-guru juga dibekali pelatihan yang tepat. Melalui program seperti Rumah Belajar dan penyediaan materi pembelajaran digital, pendidikan dapat hadir lebih merata ke seluruh pelosok negeri.

KESENJANGAN PENDIDIKAN ANTARA WILAYAH PEDESAAN DAN PERKOTAAN: ANALISIS KEBIJAKAN DAN PRAKTIK DI INDONESIA

-Cita Putri Calista, Firzan Achriansyah Izazi Putra, Felliza Maulita, Mahirah Zahra, Nasywa Aurellia Syakirah

Tantangan ke depan adalah bagaimana mensinergikan semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah harus lebih berani dalam membuat kebijakan afirmatif untuk daerah tertinggal. Sementara itu, masyarakat juga perlu didorong untuk lebih aktif dalam mengawal kebijakan dan turut serta dalam pemberdayaan pendidikan lokal. Pendidikan bukan hanya tentang angka-angka dan kurikulum, tetapi tentang membuka jalan bagi setiap anak untuk bermimpi dan mewujudkan masa depan. Oleh karena itu, mengatasi kesenjangan pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Setiap anak Indonesia, dimanapun mereka dilahirkan, harus memiliki hak yang sama untuk belajar, tumbuh, dan berhasil.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kesenjangan Pendidikan Desa dan Kota

1. Faktor Geografis dan Aksesibilitas

Faktor geografis merupakan tantangan utama dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Banyak daerah pedesaan di Indonesia yang terletak di wilayah terpencil, pegunungan, atau kepulauan dengan akses jalan yang buruk. Kondisi ini membuat anak-anak harus menempuh perjalanan jauh, bahkan melewati medan ekstrim untuk sampai ke sekolah. Selain itu, keterbatasan transportasi juga menyulitkan distribusi buku, alat pembelajaran, dan teknologi ke wilayah tersebut. Menurut Anwar (2022), ketimpangan aksesibilitas pendidikan disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit, sehingga layanan pendidikan tidak merata dan banyak sekolah di desa kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas layak, laboratorium, dan perpustakaan.

2. Kesenjangan Sosial-Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama lain yang memperlebar kesenjangan. Keluarga di daerah pedesaan umumnya memiliki pendapatan yang lebih rendah, yang berdampak pada kemampuan mereka dalam membiayai pendidikan anak. Biaya seragam, transportasi, hingga kebutuhan pendukung lain menjadi beban berat yang tidak semua keluarga sanggup tanggung. Hidayat (2017) menjelaskan bahwa meskipun pemerintah telah mengalokasikan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, namun dalam prakteknya, biaya pendidikan tetap menjadi beban yang signifikan bagi masyarakat miskin di pedesaan. Program-program bantuan seperti BOS (Dana Bantuan Operasional Sekolah) pun belum menjangkau semua daerah dengan merata.

3. Distribusi dan Kualitas Guru

Ketersediaan guru berkualitas sangat mempengaruhi mutu pendidikan. Guru-guru terbaik biasanya enggan ditempatkan di daerah terpencil karena keterbatasan fasilitas dan insentif. Akibatnya, sekolah-sekolah di desa sering kekurangan guru atau hanya memiliki guru honorer yang tidak mendapatkan pelatihan memadai. Siahaan (2013) menyebutkan bahwa sekolah-sekolah di daerah perkotaan cenderung memiliki guru-guru yang lebih berkualifikasi serta memiliki akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional. Sementara di desa, akses pelatihan sangat terbatas sehingga kualitas pengajaran menjadi kurang optimal.

4. Kepemimpinan dan Tata Kelola Pendidikan

Dimensi kepemimpinan dalam pendidikan turut berperan penting. Di banyak daerah pedesaan, tata kelola pendidikan masih belum berjalan dengan baik. Kepala sekolah sering kali tidak memiliki kapasitas manajerial yang kuat, dan praktik birokrasi yang tidak efisien memperlambat proses peningkatan kualitas pendidikan. Chairunnisa (2019) menggarisbawahi bahwa lemahnya dimensi kepemimpinan dan manajemen sekolah di tingkat lokal turut memperparah kesenjangan. Kurangnya pengawasan serta ketidaktegasan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan menyebabkan ketimpangan antara kota dan desa semakin mengakar.

5. Budaya dan Motivasi Masyarakat

Di beberapa wilayah pedesaan, terutama yang berbasis agraris, pendidikan masih belum menjadi prioritas utama. Ada pandangan bahwa pendidikan tinggi tidak terlalu diperlukan karena pada akhirnya anak-anak akan kembali bekerja sebagai petani seperti orang tua mereka. Hal ini menyebabkan rendahnya angka partisipasi sekolah dan tingginya angka putus sekolah. Menurut Anwar (2022), motivasi masyarakat di daerah yang didominasi pekerjaan tradisional seperti pertanian cenderung lebih rendah dalam menyekolahkan anak hingga jenjang tinggi. Hal ini diperparah oleh kondisi ekonomi dan sosial yang membuat pendidikan terasa "tidak relevan" dengan kehidupan mereka sehari-hari.

6. Ketimpangan Sarana Teknologi dan Digitalisasi

Perkembangan teknologi informasi seharusnya menjadi jembatan penghubung pendidikan antara kota dan desa. Namun, di Indonesia, transformasi digital belum merata. Banyak sekolah di pedesaan belum memiliki perangkat komputer, internet, atau bahkan listrik yang stabil. Padahal, pada masa pasca-pandemi, digitalisasi pendidikan menjadi sangat penting. Siahaan (2013) menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat berpotensi untuk memperluas akses pendidikan di daerah 3T. Namun, keterbatasan infrastruktur digital membuat potensi ini belum maksimal.

Karakteristik Wilayah Desa dan Kota

Prestasi belajar siswa di sekolah menunjukkan keberhasilan pendidikan; ini menunjukkan seberapa efektif pendidikan itu sendiri. Dua kelompok utama faktor mempengaruhi prestasi belajar ini: faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup potensi individu siswa, seperti bakat, minat, motivasi belajar, aktivitas yang dilakukan selama proses pembelajaran, dan tingkat intelegensi atau kecerdasan mereka. Faktor eksternal juga mencakup lingkungan belajar, metode pembelajaran, program pengajaran, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mendukung proses belajar mengajar, ketersediaan sarana pendidikan yang memadai harus direncanakan dan disiapkan dengan baik. Dalam konteks Indonesia, perbedaan karakteristik wilayah, terutama antara desa dan kota, sangat mempengaruhi akses siswa dan kualitas pendidikan. Selain itu, ketimpangan ini berdampak pada perbedaan dalam prestasi belajar siswa di seluruh negeri dan menghambat upaya untuk mencapai pemerataan pendidikan secara nasional.

Karakteristik Wilayah Desa

1. Keterbatasan Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur pendidikan masih sangat terbatas di daerah pedesaan. Banyak sekolah dasar dan menengah buruk secara fisik. Mereka memiliki ruang kelas yang buruk, peralatan belajar yang buruk, dan tidak banyak ruang pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, atau ruang keterampilan. Karena siswa dan guru tidak memiliki lingkungan belajar yang mendukung, hal ini berdampak pada kualitas proses belajar-mengajar.

2. Kekurangan Tenaga Pendidik Berkualitas

Salah satu masalah utama dalam pendidikan desa adalah kekurangan guru, terutama yang memiliki gelar akademik yang baik. Guru-guru di pedesaan biasanya berasal dari luar daerah dan ditempatkan secara sementara melalui program seperti Guru Garis Depan (GGD) atau PPG. Namun, banyak guru tidak ingin menetap lama di desa karena keterbatasan akses dan fasilitas hidup. Akibatnya, ada banyak rotasi guru. Selain jumlah yang terbatas, kualitas instruksi juga merupakan masalah. Karena kurangnya sumber daya manusia, banyak guru di desa harus mengajar lebih dari satu mata pelajaran atau menduduki posisi administratif. Kurangnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan

membuat guru desa sulit untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka, yang mengakibatkan hasil belajar yang buruk bagi siswa desa.

3. Jarak dan Akses Sekolah yang Sulit

Jarak antara rumah siswa dan sekolah dapat sangat jauh di banyak tempat pedesaan. Setiap hari, beberapa siswa bahkan harus berjalan kaki hingga belasan kilometer melalui lingkungan yang menantang seperti hutan, bukit, atau sungai. Kondisi geografis ini menjadi hambatan besar bagi pendidikan yang berkelanjutan, terutama bagi siswa SD atau SMP yang masih membutuhkan bantuan. Selain itu, transportasi umum di desa sangat terbatas atau sama sekali tidak tersedia. Banyak anak akhirnya putus sekolah karena hal ini, terutama ketika mereka harus pergi ke sekolah yang lebih tinggi di luar desa. Anak-anak desa tidak memiliki peluang yang sama dengan anak-anak kota untuk mendapatkan pendidikan yang bertahan lama dan berkualitas karena ketimpangan ini.

Kondisi ini diperparah oleh jarak sekolah yang jauh dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Siswa di desa sering tertinggal dalam kualitas pembelajaran dan peluang pendidikan lanjut. Menurut Aslan (2018), ada perbedaan antara sekolah desa dan perkotaan dalam hal kualitas pendidikan dan karakteristik anak didik.

Karakteristik Wilayah Kota

1. Infrastruktur Pendidikan yang Lengkap dan Modern

Menurut Cynthia (2016), kondisi sekolah di kota umumnya lebih maju daripada di desa. Sekolah-sekolah yang ada di kota memiliki fasilitas yang lumayan cukup untuk menunjang pembelajaran, berdasarkan fasilitasnya. Penunjang tersebut secara tidak langsung meningkatkan kualitas pendidikan di daerah perkotaan. Sekolah-sekolah di kota biasanya memiliki fasilitas fisik dan digital yang lengkap, seperti laboratorium komputer, perpustakaan kontemporer, ruang multimedia, dan koneksi internet yang stabil. Dengan bantuan fasilitas ini, proses belajar menjadi lebih interaktif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Siswa juga dapat mengakses berbagai fasilitas tambahan, seperti bimbingan belajar, kursus bahasa, dan pelatihan keterampilan di banyak kota besar.

Kemudahan infrastruktur ini sangat membantu siswa kota berprestasi akademik. Mereka lebih siap untuk menghadapi ujian nasional, seleksi masuk perguruan tinggi, dan tantangan di seluruh dunia karena mereka telah terbiasa menggunakan berbagai sumber dan pendekatan belajar. Kondisi ini membedakan siswa di desa dengan akses terbatas terhadap fasilitas dasar.

2. Tenaga Pendidik Berkualifikasi Tinggi

Selain memiliki fasilitas pendidikan yang cukup baik, guru di kota-kota ini memiliki keahlian yang cukup. Ini disebabkan oleh banyaknya guru yang lebih tertarik untuk mengajar di kota dan jumlah tenaga pendidik dengan latar belakang pendidikan formal yang lebih tinggi di wilayah perkotaan. Banyak guru di kota ini adalah lulusan universitas terkemuka dan secara teratur mengikuti pelatihan pengembangan profesional. Siswa mendapatkan pendidikan yang lebih baik karena pengajaran yang baik. Mereka tidak hanya memperoleh konten yang sesuai dengan kurikulum, tetapi mereka juga memperoleh keterampilan untuk berpikir kritis, inovatif, dan bekerja sama. Pendidikan yang baik mempengaruhi minat belajar dan prestasi akademik siswa di tingkat lokal dan nasional. Menurut Wahyono (2006), kemampuan bertahan dalam kompetisi sosial-ekonomi membuat orang perkotaan memiliki pandangan dunia yang lebih progresif dan keinginan untuk maju. Mereka adalah pemenang dalam proses pergulatan hidup yang sulit di mana mereka harus bertahan hidup di tengah bangunan yang kuat dan eksploratif. Ini berarti bahwa daerah perkotaan memiliki infrastruktur

pendidikan, sumber daya, dan fasilitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan.

3. Akses yang Mudah terhadap Lembaga Pendidikan

Banyak lembaga pendidikan formal dan informal yang tersedia di kota merupakan keuntungan. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan universitas dapat dengan mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Dengan akses ini, orang dapat memilih sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Selain itu, siswa di kota tidak hanya belajar di sekolah, tetapi mereka juga memiliki banyak kesempatan untuk berkembang di luar kelas formal. Ada banyak kursus tambahan dan lembaga pelatihan seperti komputer, bahasa asing, dan sains. Siswa yang tinggal di desa mungkin hanya mengenal satu sekolah dan tidak memiliki pilihan lain. Hal ini sangat kontras.

4. Kesadaran dan Dukungan Orang Tua terhadap Pendidikan

Orang tua yang tinggal di kota biasanya memiliki pendidikan dan penghasilan yang lebih tinggi. Mereka lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan lebih cenderung aktif mendampingi dan membantu anak belajar. Banyak orang tua di kota yang bersedia menghabiskan uang dan waktu untuk menghadiri pertemuan sekolah, mengajar anak di rumah, atau membiayai les tambahan. Keberhasilan akademik anak sangat dipengaruhi oleh dukungan orang tua. Siswa yang mendapatkan dukungan akademik dan emosional dari keluarga cenderung lebih tertarik untuk belajar. Sebaliknya, anak-anak yang tinggal di daerah rural seringkali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan bimbingan dari orang tua mereka. Ini terkait dengan latar belakang pendidikan orang tua mereka serta keterbatasan waktu yang disebabkan oleh pekerjaan mereka dan waktu mereka yang terbatas.

Analisis Komparatif Minat Pendidikan Desa dan Kota

Di Indonesia, ada perbedaan minat terhadap pendidikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Ini masih menjadi tantangan nyata di tengah upaya mewujudkan pendidikan berkualitas dan merata sebagaimana tertuang dalam *sustainable development goals* (SDGs 4). Minat pendidikan menunjukkan perbedaan yang mencolok antara masyarakat desa dan kota. Ini karena itu menunjukkan keinginan dan kesadaran akan pentingnya belajar. Menurut data BPS Maret 2023, 49,16% penduduk usia 15 tahun ke atas di kota telah menamatkan sekolah menengah atau sederajat, sedangkan 27,98% di desa. Selain itu, 5,11% penduduk desa tidak atau belum pernah sekolah, dibandingkan dengan 1,93% di kota. Aksesibilitas, keadaan sosial ekonomi, ketersediaan guru, dan pengaruh teknologi dan budaya adalah faktor struktural yang sangat penting untuk perbedaan ini, bukan hanya masalah psikologis.

Minat terhadap pendidikan cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan. Hal ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur pendidikan modern yang lengkap, seperti laboratorium dan akses internet, serta keberadaan institusi pendidikan berkualitas tinggi di pemerintah dan swasta. Selain itu, dibandingkan dengan desa, guru berpendidikan tinggi lebih banyak tersebar di wilayah perkotaan (Siahaan, 2013). Selain itu, masyarakat kota lebih toleran terhadap perubahan dan percaya bahwa pendidikan adalah kunci mobilitas sosial dan kemakmuran ekonomi (Wahyono, 2017). Siswa dan orang tua di kota yang kompetitif bersaing untuk mendapatkan pendidikan terbaik.

Sebaliknya, masyarakat desa menghadapi berbagai kesulitan dalam menumbuhkan minat terhadap pendidikan dan mendapatkan akses kenyataan. Salah satu tantangan terbesar adalah infrastruktur yang tidak memadai, termasuk jalan yang tidak memadai, fasilitas yang terbatas, dan jumlah guru yang terbatas. Sebagian besar guru yang ditempatkan di desa menghadapi tantangan karena sulit mendapatkan transportasi dan memiliki fasilitas sekolah yang terbatas,

KESENJANGAN PENDIDIKAN ANTARA WILAYAH PEDESAAN DAN PERKOTAAN: ANALISIS KEBIJAKAN DAN PRAKTIK DI INDONESIA

-Cita Putri Calista, Firzan Achriansyah Izazi Putra, Felliza Maulita, Mahirah Zahra, Nasywa Aurellia Syakirah

yang menyebabkan mereka enggan mengajar di wilayah pedalaman. Anak-anak di desa harus berjalan jauh atau meniti kabel baja di atas sungai untuk pergi ke sekolah, bahkan dalam situasi tertentu (Vito et al., 2021). Kondisi ini membuat anak tidak ingin pergi ke sekolah secara teratur, apalagi lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Faktor sosial ekonomi juga meningkatkan disparitas. Anak-anak di desa sering berasal dari keluarga petani atau buruh harian dengan penghasilan rendah, dan motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka rendah karena mereka percaya bahwa mereka akan tetap menjadi petani meskipun mereka pergi ke sekolah tinggi (Anwar, 2022). Selain itu, biaya pendidikan seperti seragam, buku, dan transportasi meningkat. Hidayat (2017) mencatat bahwa keluarga miskin di pedesaan masih menghadapi beban biaya pendidikan yang besar, meskipun APBN dialokasikan secara signifikan untuk pendidikan. Akibatnya, pendidikan tidak lagi menjadi prioritas utama, terutama jika anak-anak dianggap memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membantu di rumah atau di ladang. Sebaliknya, komunitas di kota-kota yang memiliki ekonomi yang lebih baik dapat memberikan dukungan penuh untuk pendidikan anak-anaknya. Mereka dapat memberikan bahan ajar tambahan dan fasilitas belajar tambahan (Anwar, 2022).

Dalam hal budaya, masyarakat kota lebih toleran terhadap konsep pendidikan progresif dan multikultural. Meskipun demikian, banyak kebiasaan desa yang terus menerus menolak perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi (Anwar, 2022). Menurut Wahyono (2017), kurangnya model peran dan inspirasi komunitas juga berkontribusi terhadap aspirasi pendidikan yang rendah di desa.

Di sisi lain, perlu diakui bahwa perbedaan minat ini tidak berlaku secara mutlak. Banyak desa yang sangat rajin belajar, terutama ketika didukung oleh program afirmatif pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa KIP Kuliah, dan guru dan relawan. Sebaliknya, dalam lingkaran kemiskinan struktural, masyarakat miskin di kota-kota memiliki minat pendidikan rendah.

Implikasi Kesenjangan Minat Pendidikan terhadap Pembangunan Ekonomi dan Capaian SDGs Poin 4 (Pendidikan Berkualitas)

Tidak adanya kesetaraan dalam minat siswa dan guru terhadap pendidikan mencerminkan ketidaksamaan pendidikan yang lebih luas di Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa istilah "ketidaksetaraan minat pendidikan" tidak selalu muncul secara eksplisit dalam berbagai laporan dan studi, efeknya dapat dilacak melalui analisis disparitas dalam akses, kualitas, dan distribusi tenaga pengajar. Pada akhirnya, hal ini berdampak pada dorongan untuk belajar dan mengajar. Ketidaksetaraan ini berdampak negatif pada pembangunan ekonomi nasional dan menghambat pencapaian poin 4 *sustainable development goals* (SDGs), yaitu pendidikan yang berkualitas.

Ketidaksetaraan Minat Pendidikan sebagai Akar Masalah Ketimpangan Pendidikan

Terdapat bukti bahwa kurangnya minat, terutama dari guru, dapat memperparah ketimpangan pendidikan. Sebuah laporan tentang "Kesenjangan Pendidikan Desa dan Kota" dengan jelas menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan jumlah dan kualitas tenaga pengajar antara sekolah perkotaan dan pedesaan adalah kurangnya minat guru untuk mengajar di daerah pedesaan (Vito, Krisnani, & Resnawaty, et al.). Mengurangi minat ini disebabkan oleh fasilitas sekolah yang buruk dan kurangnya akses transportasi di daerah pedesaan. Kedua faktor ini berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima siswa di sana. Seiring waktu, kualitas pendidikan yang buruk ini dapat mempengaruhi minat belajar siswa.

Selain itu, menurut sebuah penelitian yang disebut sebagai "Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Indonesia: Kesenjangan Pendidikan", ketimpangan pendidikan di Indonesia

dicirikan oleh ketidaksetaraan dalam hal akses ke pendidikan, kualitas, dan sumber daya belajar. Kondisi geografis, kebijakan pemerintah, ekonomi, dan kualitas guru adalah beberapa penyebab utama yang diidentifikasi (Wijayanti, Darmawan, & Marwan, 2024). Ketika keinginan untuk menjadi guru berkualitas rendah atau keinginan untuk menjadi guru profesional rendah, kualitas pendidikan di wilayah tersebut akan sulit meningkat.

Implikasi Terhadap Pembangunan Ekonomi

Ketidakseimbangan minat pendidikan, yang mengakibatkan ketimpangan kualitas pendidikan, memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Menurun.

Kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan cenderung di bawah standar jika minat siswa dan pendidik terhadap pendidikan rendah. Menurut sebuah tinjauan tentang "Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs)," kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah dan diperlukan peningkatan yang signifikan (Nurfatimah, Hasna, & Rostika, 2022). Sumber daya manusia yang kurang berkualitas akan menghadapi tantangan di pasar kerja yang semakin kompetitif, yang pada gilirannya akan menghambat produktivitas nasional. Vito, Krisnani, dan Resnawaty (t.t.) dan Wijayanti, Darmawan, dan Marwan (2024) menyatakan bahwa generasi muda di daerah tertinggal tidak memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara optimal dalam sektor ekonomi modern karena tidak adanya kesetaraan dalam ketersediaan guru berkualitas tinggi dan fasilitas yang memadai.

2. Meningkatkan Disparitas Pendapatan dan Kesejahteraan.

Karena ketidaksetaraan minat dan kualitas pendidikan, orang dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih rendah akan lebih mungkin menemukan pekerjaan dengan gaji rendah atau di sektor informal. Hal ini secara langsung meningkatkan disparitas pendapatan antar individu dan daerah. Sebuah analisis "Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural" menyatakan bahwa pendidikan harus menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan (Anwar, t.t.). Tujuan mulia ini akan sulit tercapai jika kualitas pendidikan dan akses tidak merata. Selain itu, ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh ketidaksetaraan pendidikan (Adhani, Rahmawati, & Rachman, 2024). Hal ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan lingkungan investasi, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

3. Menghambat Kreativitas dan Daya Saing Nasional.

Ekonomi dunia saat ini sangat bergantung pada inovasi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan, akan sulit bagi sumber daya manusia yang kurang terdidik dan tidak memiliki minat untuk terus belajar dan berinovasi. Dalam sebuah artikel berjudul "Menuju ke Arah Pendidikan Berkualitas di Daerah Tertinggal dan Perbatasan Melalui Pemanfaatan TIK" (Siahaan, 2013), ditunjukkan bahwa kurangnya minat terhadap pendidikan, termasuk literasi digital, dapat menghalangi adopsi teknologi yang sangat penting untuk daya saing ekonomi. Suatu negara akan tertinggal dalam persaingan global jika tidak melakukan inovasi dan adaptasi.

Implikasi Terhadap Capaian SDGs Poin 4 (Pendidikan Berkualitas)

Ketidaksetaraan minat pendidikan secara fundamental menghambat tercapainya SDGs poin 4, yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Berikut ini beberapa hambatan tercapainya SDGs poin 4:

1. Sebagaimana dijelaskan oleh Vito, Krisnani, dan Resnawaty (t.t.), kurangnya minat guru untuk mengajar di daerah pedesaan menggagalkan upaya pemerataan kualitas guru. Target pendidikan berkualitas tinggi tidak akan tercapai jika tidak ada guru yang berkualitas dan berdedikasi di seluruh wilayah.
2. Semua upaya untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitasnya akan sia-sia jika minat belajar siswa dan minat guru rendah di daerah tertentu. Sebuah penelitian berjudul "Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Indonesia: Kesenjangan Pendidikan" (Wijayanti, Darmawan, & Marwan, 2024) menemukan bahwa disparitas menjadi lebih buruk di daerah terpencil ketika tidak ada teknologi dan sumber daya yang tersedia. Kondisi akan menjadi lebih buruk karena ketidaksetaraan minat ini. Sebuah kajian etnografi mengenai pendidikan perkotaan dan pedesaan (Wahyono, t.t.) juga menekankan bahwa ada perbedaan dalam kualitas pendidikan antara desa dan kota. Hal ini disebabkan oleh kekurangan sarana prasarana dan guru profesional yang cukup.
3. SDGs 4 tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga pada kesempatan belajar yang berlangsung sepanjang hidup. Jika minat terhadap pendidikan sudah hilang sejak kecil, keinginan untuk belajar dan berkembang sepanjang hidup juga akan terpengaruh. Ini akan menghambat pertumbuhan masyarakat yang kreatif, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan di seluruh dunia.

Secara keseluruhan, ketidaksetaraan minat pendidikan dan ketimpangan pendidikan yang lebih luas menyebabkan lingkaran setan yang menghambat kemajuan ekonomi dan mencegah Indonesia mencapai SDGs Poin 4. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan pendekatan yang luas. Pendekatan ini harus mencakup hal-hal seperti memberikan akses yang sama kepada pendidikan dan fasilitasnya, memberikan insentif yang menarik bagi guru di daerah terpencil, dan melakukan kampanye untuk meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Strategi Mengurangi Kesenjangan Pendidikan Desa dan Kota

1. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Pendidikan di Daerah

Akses pendidikan yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah et al. (2024), ada perbedaan yang signifikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan dalam hal ketersediaan fasilitas. Sekolah di daerah perkotaan memiliki laboratorium, perpustakaan, ruang kelas yang nyaman, dan akses internet yang stabil. Namun, banyak sekolah di wilayah pedesaan masih kekurangan fasilitas dasar, ruang kelas yang sempit, dan dukungan teknologi yang kurang. Strategi yang dapat dilakukan meliputi:

- Konstruksi dan renovasi besar-besaran gedung sekolah di wilayah pedesaan.
- Penyediaan perangkat digital dan jaringan internet, seperti program "Internet Masuk Desa".
- Anggaran khusus dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal.

2. Pemerataan Distribusi Guru Berkualitas

Salah satu masalah utama adalah guru tidak tertarik untuk mengajar di daerah terpencil karena mereka tidak memiliki fasilitas yang memadai dan insentif yang cukup. Menurut Vito et al. (2022), jumlah guru lebih banyak terdapat di perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran yang tidak sebanding. Solusi strategis antara lain:

- Peningkatan insentif dan tunjangan bagi guru yang bekerja di daerah terpencil.
- Program afirmatif seperti SM3T (Sarjana Pendidikan di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

KESENJANGAN PENDIDIKAN ANTARA WILAYAH PEDESAAN DAN PERKOTAAN: ANALISIS KEBIJAKAN DAN PRAKTIK DI INDONESIA

-Cita Putri Calista, Firzan Achriansyah Izazi Putra, Felliza Maulita, Mahirah Zahra, Nasywa Aurellia Syakirah

- Pelatihan berkelanjutan (Continuous Professional Development) berbasis teknologi.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) menjadi strategi yang sangat menjanjikan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. TIK berpotensi tidak hanya untuk memperluas kesempatan memperoleh layanan pendidikan tetapi juga untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas, kata Sudirman Siahaan (2013). Langkah strategis:

- Pelatihan guru agar mampu menggunakan teknologi pembelajaran digital
- Membuat platform pendidikan *e-learning* khusus untuk daerah terpencil.
- Pemanfaatan sistem pembelajaran daring dan *hybrid* sebagai solusi jangka panjang.

4. Pendidikan Multikultural dan Inklusif

Fokus dari pendekatan ini adalah mengakui dan mengelola keragaman sosial-budaya yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Pendidikan multikultural dapat membantu mengatasi diskriminasi dan kesenjangan akses pendidikan yang disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, dan geografis, menurut Anwar (2022). Pengimplementasian konkret:

- Kurikulum lokal yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat lokal.
- Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pendidikan.
- Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter untuk membangun solidaritas sosial.

5. Reformasi Kebijakan dan Anggaran yang Berkeadilan

Kebutuhan lokal harus dipertimbangkan dalam kebijakan pendidikan nasional. Menurut Anwar Hidayat (2017), pemerataan pendidikan secara sarana dan prasarana yang mendukung proses pendidikan harus dilakukan tanpa membedakan lokasi. Langkah yang dapat ditempuh:

- Reformasi kebijakan zonasi agar lebih adaptif terhadap kondisi geografis.
- Realokasi dana pendidikan dengan prinsip afirmatif (memberi lebih untuk yang tertinggal).
- Monitoring dan evaluasi partisipatif terhadap implementasi kebijakan.

6. Kolaborasi Multi-Pihak

Kesenjangan pendidikan tidak dapat diatasi hanya oleh pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil harus bekerja sama. Chairunnisa (2019) menyatakan bahwa peran serta pemimpin dan pemerintah sangat menentukan arah kebijakan dalam mengatasi kesenjangan pendidikan. Strategi konkret:

- Membangun kemitraan publik-swasta untuk penyediaan fasilitas pendidikan.
- Mengadvokasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan untuk membantu pendidikan di daerah tertinggal.
- Pemberdayaan komunitas lokal melalui pelatihan dan penguatan kapasitas.

ANALISIS STUDI KASUS

“Kesenjangan Pendidikan antara Kabupaten Sumba Timur (Wilayah Desa) dan Kota Kupang (Wilayah Kota) di Provinsi Nusa Tenggara Timur”

Masing-masing daerah di Indonesia memiliki ciri unik. Dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki tingkat pendidikan masyarakat yang sangat rendah. Kualitas sumber daya manusia harus dipertimbangkan karena akan memengaruhi cara orang berpikir dan mengembangkan cara mereka mengelola sumber daya alam dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, program pendidikan di seluruh kabupaten harus ditingkatkan, terutama di daerah perbatasan yang kadang-kadang belum terjamah sama sekali, menurut Kementerian PPN/Bappenas (2017). Sektor pertanian dan peternakan mendominasi wilayah perbatasan Provinsi NTT, menurut Kennedy (2019). Seringkali, hambatan pengembangan potensi sumber daya alam kawasan perbatasan adalah

KESENJANGAN PENDIDIKAN ANTARA WILAYAH PEDESAAN DAN PERKOTAAN: ANALISIS KEBIJAKAN DAN PRAKTIK DI INDONESIA

-Cita Putri Calista, Firzan Achriansyah Izazi Putra, Felliza Maulita, Mahirah Zahra, Nasywa Aurellia Syakirah

masalah kualitas sumber daya manusia yang rendah karena pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia belum optimal. Sangat jarang program yang memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat perbatasan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam mengelola potensi sumber daya alam wilayah perbatasan.

Salah satu provinsi di Indonesia dengan indeks pembangunan manusia (IPM) dan lama sekolah rata-rata yang paling rendah adalah Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara daerah pedesaan seperti Kabupaten Sumba Timur masih mengalami berbagai keterbatasan dalam penyelenggaraan pendidikan, Kota Kupang, sebagai ibu kota provinsi, menjadi pusat pendidikan dengan infrastruktur yang lebih canggih.

Banyak sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Sumba Timur beroperasi dengan fasilitas yang terbatas. Laporan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan NTT menunjukkan bahwa banyak sekolah tidak memiliki gedung permanen, ruang kelas mereka rusak, dan mereka kekurangan buku pelajaran dan alat peraga. Selain itu, jumlah guru terbatas dan sebagian besar guru tidak memenuhi syarat akademik. Siswa mengalami kehadiran yang tidak konsisten dan tingkat putus sekolah yang tinggi karena masalah geografis seperti jarak yang jauh, medan yang sulit, dan kurangnya akses transportasi.

Sebaliknya, ada cukup fasilitas pendidikan di Kota Kupang. Sekolah memiliki perpustakaan, laboratorium, dan akses internet. Selain itu, lebih banyak tenaga pengajar di kota yang telah disertifikasi dan memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan rutin. Selain itu, siswa yang tinggal di kota memiliki akses ke pelajaran tambahan, kursus komputer, dan program pertukaran pelajar yang tidak tersedia bagi siswa yang tinggal di pedesaan.

Perbedaan mencolok ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan belum menanggapi ketimpangan geografis secara keseluruhan. Karena kurangnya insentif dan kurangnya jaminan fasilitas penunjang hidup, upaya seperti pengiriman guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) atau Guru Garis Depan (GGD) tidak dapat menjawab kekurangan tenaga pendidik di daerah terpencil. Sementara itu, program digitalisasi sekolah nasional tidak berhasil di wilayah seperti Sumba Timur karena kekurangan infrastruktur listrik dan jaringan.

KESIMPULAN

Di Indonesia, perbedaan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih merupakan tantangan besar untuk mencapai pemerataan akses pendidikan. Disproporsi ini disebabkan oleh faktor ekonomi, geografis, dan sosial. Anak-anak di wilayah pedesaan sering menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga pengajar yang kurang, dan akses yang terbatas terhadap teknologi. Bantuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran adalah beberapa kebijakan pemerintah yang perlu ditinjau lebih lanjut agar hasilnya maksimal. Teknologi adaptif dapat membantu meningkatkan pendidikan di wilayah tertinggal selain masalah kebijakan. Selain itu, kesadaran akan pentingnya pendidikan harus ditingkatkan, terutama di tempat-tempat di mana pekerjaan tradisional lebih diutamakan daripada pendidikan formal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran langsung tentang komponen yang mempengaruhi kesenjangan pendidikan dan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan melalui analisis kebijakan dan data empiris. Pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada pemerintah; masyarakat dan akademisi juga harus bekerja sama untuk membuat ekosistem pendidikan yang lebih merata. Perubahan kebijakan, pembagian guru yang lebih adil, dan penggunaan teknologi dapat menjadi pendekatan penting untuk mengatasi disparitas ini. Hak atas pendidikan berkualitas harus dipenuhi, jadi perlu dilakukan tindakan konkret untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama dan berkelanjutan ke sistem pendidikan, tidak peduli di mana mereka berada.

KESENJANGAN PENDIDIKAN ANTARA WILAYAH PEDESAAN DAN PERKOTAAN: ANALISIS KEBIJAKAN DAN PRAKTIK DI INDONESIA

-Cita Putri Calista, Firzan Achriansyah Izazi Putra, Felliza Maulita, Mahirah Zahra, Nasywa Aurellia Syakirah

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi* (Cet. 2). Bandung: Unpad Press.
- Adhani, R. N., Rahmawati, V., & Rachman, I. F. (2024). Meningkatkan Kesadaran Digital: Peran Literasi Digital Dalam Merespon Masalah Moral dan Ketimpangan Sosial Menuju Pencapaian SDGS 2030. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama*, 2(3), 107-114.
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Multikultural. *FOUNDASIA*, 13(1), 1–15.
- Aslan. (2015). ‘Pengembangan Kurikulum Ke Arah Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)’, *Proceeding of 1st International Conference on ASEAN Economic Community in Borneo Region*, (October), pp. 1–12.
- Chairunnisa, A. (2019). Problematika Pendidikan di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial UNIMED, 3, 775–779.
- Cynthia, L.C., Martono, T. and Indriayu, M. (2015) ‘Pengaruh Fasilitas Belajar Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI IIS Di SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016’, *Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi*, 01(02), pp. 1–20.
- Hidayat, A. (2017). Kesenjangan Sosial terhadap Pendidikan sebagai Pengaruh Era Globalisasi. *Jurnal Justisi Hukum*, 2(1), 15–19.
- Kementerian PPN/Bappenas, 2017, PrADA Profil dan Analisis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017, Jakarta: Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, pp.1-40.
- Kennedy, P. S. J., Tobing, S. J. L., Toruan, R. L., Tampubolon, E., & Nomleni, A. (2019). Isu Strategis Kesenjangan Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 2(1), 619–629.
- Nurfatimah, S. A., Hasna, S., & Rostika, D. (2022). Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan SDGs. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6145–6154.
- Siahaan, S. (2013). Menuju ke Arah Pendidikan Berkualitas di Daerah Tertinggal dan Perbatasan melalui Pemanfaatan TIK. *Jurnal Teknодик*, 17(1), 596–599.
- Sudiro, F. S., Nasir, L., Lilanti, & Mujiati. (2024). Studi Perbandingan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. *Jurnal Islamic Education Manajemen*, 9(1), 25–36.
- UN-ilibrary. (2021). Sustainable Transport, Sustainable Development. In *Sustainable Transport, Sustainable Development*. <https://doi.org/10.18356/9789210010788>
- Vito, B., Krisnani, H., & Resnawaty, R. (2022). Kesenjangan Pendidikan Desa dan Kota. Prosiding KS: Riset & PKM, 2(2), 247–249.
- Wahyono, S. B. (2006). Studi Etnografi untuk Pendidikan Perkotaan dan Pedesaan. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 2(1), 1–15. https://eprints.uny.ac.id/700/1/Studi_Etnografi_untuk_Pendidikan_Perkotaan_dan_-Pedesaan.pdf.
- Wahyono, S. B. (2012). Studi Etnografi untuk Pendidikan Perkotaan dan Pedesaan. UNY Repository.
- Wijayanti, A., Darmawan, A. W., & Marwan, I. (2024). Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Indonesia: Kesenjangan Pendidikan. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(3), 187–192.